

## BAB V

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### A. Kesimpulan

Sesuai hasil kajian dan pembahasan terhadap persoalan demokrasi dalam pandangan Hizbut Tahrir, dengan aspek kajian meliputi; Konsep Hizbut Tahrir mengenai Islam dan syariat Islam, urgensi menegakkan syariat Islam, konsep Hizbut Tahrir terhadap sekulerisasi politik, demokrasi dan wacana penegakkan syariat Islam, tawaran Hizbut Tahrir untuk mengganti demokrasi, keharusan mengangkat khalifah Strateginya, pemilu dan parpol Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Syariat Islam merupakan ketentuan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah atas hamba-hamba-Nya yang diturunkan melalui Rasul-Nya, Muhammad saw., untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, dengan dirinya sendiri, dan dengan sesamanya. Artinya, cakupan syariat Islam meliputi akidah dan syariat. Dengan kata lain, syariat Islam bukan hanya mengatur seluruh aktivitas fisik manusia (*af'âl al-jawârih*), tetapi juga mengatur seluruh aktivitas hati manusia (*af'âl al-qalb*) yang biasa disebut dengan akidah Islam. Dengan definisi syariat Islam baik secara etimologis maupun terminologis *syar'i* di atas, tampak jelas bahwa ruang lingkup syariat Islam adalah seluruh ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan akidah maupun peraturan atau

sistem kehidupan yang menjadi turunannya. syariat Islam sesungguhnya meliputi keyakinan spiritual ('aqîdah rûhiyyah) dan ideologi politik ('aqîdah siyâsiyyah)

2. Berjuang menegakkan syari'ah Islam merupakan *fardhu 'ain* bagi setiap mu'min dalam segala situasi dan kondisi. Islam sebagai satu harakah atau gerakan, menuntut umatnya agar senantiasa aktif berdakwah menyebarkan ajarannya karena tidak akan pernah mencapai tujuannya jika umatnya memahami Islam hanya sebagai satu akidah dan syari'ah saja. Islam sebagai satu akidah bermakna ialah mengimaninya bahwa Islam adalah satu-satunya kebenaran mutlak yang tidak terdapat pada agama selainnya. Hanya Islamlah yang ajarannya paling tinggi, terpuji dan mulia, sementara ajaran selainnya adalah rendah, hina, dan tercela. Sehingga dengan mengimaninya, memahami, dan mengamalkan ajarannya akan mendapat ketenangan, kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Selain itu syariat bertugas Memelihara akidah, Memelihara keselamatan hidup, Memelihara kesehatan akal dan mental, Memelihara kesucian keturunan, Memelihara hak kebendaan, baik milik pribadi maupun masyarakat.
3. Demokrasi bertentangan secara total dengan Islam. Dalam demokrasi, rakyat memilih penguasa untuk menjalankan hukum yang dibuat oleh rakyat. Sementara dalam Islam, rakyat memilih penguasa untuk menerapkan hukum-hukum syara'. Sebab Islam memerintahkan kita semua untuk berhukum dan memutuskan perkara menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu menurut hukum syara' (QS al-Maidah [5]: 48,

49). Islam mengaitkan aktivitas menjadikan Rasul SAW sebagai pemutus perkara yang terjadi di tengah manusia yaitu artinya berhukum kepada syara' sebagai bukti keimanan (QS an-Nisa [4]: 65). Bahkan Allah menetapkan siapa saja yang memutuskan perkara dengan selain apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu menurut selain hukum syara' sebagai orang zalim (QS al-Maidah [5]: 45), fasik (QS al-Maidah [5]: 47), bahkan kafir (QS al-Maidah [5]: 44).

4. Khilafah adalah jalan yang dipilih oleh Hizbut Tahrir guna menggantikan demokrasi yang menurut mereka adalah hukum kafir. Penolakan itu atas dasar bahwa seolah demokrasi sudah dianggap sebagai akidah oleh pengikutnya, yang berarti tidak ada yang lebih tinggi derajatnya selain demokrasi dan sistemnya. Hal ini yang mengakibatkan para pejuang khilafah menyerukan khilafah yang sistemnya bersumber dari syariat Islam.
5. Strategi yang diusung Hizbut Tahrir mencakup kaderisasi, interaksi, dan *Tholabun Nushroh* atau meminta dukungan dari *Ahlul Quwwah*. Selain itu mereka juga aktif dalam demo-demo melawan demokrasi dan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan syariat, halaqoh, dakwah melalui media dan dialog-dialog.
6. Partai politik peserta pemilu yang ada, meski mengaku parpol Islam tetapi identitasnya bukan Islam, sebab platformnya bukan Islam, yang diusung bukan ide-ide Islam. Yang ada hanyalah parpol berbasis massa Islam karena platform parpol-parpol tersebut sama saja dan ide-ide yang

diusungnya juga ide kapitalis, demokrasi, dan HAM. Mengaku parpol Islam tapi identitasnya bukan Islam, tapi kapitalisme demokrasi.

## B. Implikasi

1. Dalam perjuangannya menegakkan syariat Islam, Hizbut Tahrir sudah seharusnya memiliki anggota-anggota yang berkarakter dan berideologi kuat terhadap ajaran Islam. Selain itu, figur yang memiliki kesiapan baik dari segi intelektual maupun mental; sosok yang matang secara pemikiran dan siap lahir batin dalam memperjuangkan syariat Islam, komitmen, konsisten meski harus berhadapan dengan pemikiran kufur yang berasal dari sistem demokrasi yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat.
2. Hizbut Tahrir yang sudah mempunyai tekad bulat melawan demokrasi hendaknya harus benar-benar mengambil langkah pasti guna segera menegakkan syariat Islam dan tidak mengikuti apapun fasilitas yang diberikan demokrasi seperti demo, mengkritik pemerintah secara terang-terangan, dsb.
3. Hizbut Tahrir sudah pasti memiliki peran penting dalam menjelaskan sistem Khilafah dan segala hukum yang terkait kepada semua lapisan masyarakat. Selain itu, Khalifah yang akan ditunjuk oleh Hizbut Tahrir bisa saja menimbulkan pro dan kontra, sehingga Khalifah bisa benar-benar mewakili umat Islam secara keseluruhan.
4. Hizbut Tahrir yang mengkritik partai-partai Islam yang masuk parlemen, harus bisa menjadi contoh partai yang memiliki kekuatan tanpa harus masuk ke dalam parlemen. Aksi nyata dan mampu dirasakan oleh

masyarakat, bahwa Hizbut Tahrir memberikan pengaruh baik bagi kehidupan bernegara. Hal ini dapat terwujud ketika Hizbut Tahrir mulai dari pusat hingga regional kampus, memberikan pelayanan, pemahaman, dan pendekatan yang baik kepada setiap masyarakat yang berada di wilayah perjuangannya.

